



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

ديوان فروع كلن رعيت كيو فتن بنر مريه

Jln. Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

NOMOR : 06 / KPTS / DPRK / 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRK BENER MERIAH
NOMOR : 05/KPTS/DPRK/2121 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA KABUPATEN (APBK) BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tahapan Pembahasan Rancangan Qanun Perangungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Bener Meriah.

- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan : 1. Memperhatikan Surat Pengantar Plt. Bupati Bener Meriah No 900/840/2021 Tanggal 31 Mei 2021

Uraian :

- Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terdiri dari Neraca, LRA, LPSAL, Laporan Arus Kas, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Bener Meriah TA. 2020.
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah tanggal 14 Juni 2021 tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah TA. 2020;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Tanggal 16 Juni 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
 4. Surat Fraksi Golongan Karya Nomor : 01/F-GOLKAR, 16 Juni 2021 Perihal Pengiriman Nama-nama Anggota PANSUS Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
 5. Surat Fraksi Partai PKB Nomor : 01 /F-PKB/XII, 16 Juni 2021 Perihal Pengiriman Nama-nama Anggota PANSUS Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
 6. Surat Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional Nomor : 01 /FG-GNN, 16 Juni 2021 Perihal Pengiriman Nama-nama Anggota PANSUS Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
 7. Berita Acara Nomor :180/02/PANSUS/2021, Tanggal 16 Juni 2021, tentang PANSUS Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah beberapa Ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor : 05/KPTS/DPRK/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana yang tersebut pada diktum kesatu adalah Penambahan pelaksanaan PANSUS pada tanggal 28 dan 29 Juni 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 25 Juni 2021 M
16 Julkaidah 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

Ketua



MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Bener Meriah di Redelong;
7. Masing-masing Anggota untuk diketahui;
8. Pertinggal